

MADRASAH SEBAGAI OUTPUT DIKOTOMISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Muhamad Akip dan Nurlila Kamsi

STAI BS Lubuklinggau

Email: *muhammdaakip@gmail.com*

Email: *nurilakamsi@gmail.com*

Abstrak

Dikotomis dalam pendidikan yang akan menciptakan individu tidak bersatu atau pribadi intelektual yang memahami ilmu keagamaan namun tidak mempunyai pemahaman dan mengikuti perkembangan teknologi sehingga menimbulkan asumsi ketidak siapan dalam mengikuti perkembangan sebaliknya, ada pribadi intelektual yang mampu menguasai dan menghadapi adanya perkembangan teknologi, namun dalam jiwanya tidak memiliki dasar ilmu keagamaan yang baik. dikotomi antara ilmu agama dan umum yang melahirkan dua sistem pendidikan di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan umum dan agama diantaranya Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengan Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) sedangkan yang agama Raudhatul Athfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Keislaman (PTKIS) baik swasta maupun negeri yang menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan dan segala dampak yang ditimbulkannya. oleh dikotomi baik dari pengelolaan, bantuan atau bahkan program bantuan sarana dan prasarana sampai aplikasi data pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan. Muhaimin mengungkapkan bahwa lahirnya madrasah di Indonesia merupakan (1) Sebagai pembaharuan sistem pendidikan Islam. (2) Penyempurnaan sistem pendidikan di pesantren yang sama menggunakan sekolah formal. (3) Pembiasaan perilaku mental (4). Sebagai solusi untuk menjembatani sistem pendidikan tradisional di pesantren dan sistem pendidikan modern.

Kata Kunci: *Pendidikan dan dikotomi*

A. Pendahuluan

Pendidikan formal mandiri dirancang untuk orang-orang dengan kemampuan finansial, pendidikan elit, waktu dan kualitas, tempat ini untuk siswa sekolah menengah. Sebaliknya, pendidikan formal standar adalah pendidikan "normal", tempat berkumpulnya anak-anak miskin dan kurang mampu yang dibiayai oleh pemerintah. Dikotomi antara pendidikan formal mandiri dan pendidikan formal standar tampaknya tidak menjadi masalah di masyarakat kelas menengah. Selain akibat dari berbagai kebijakan pemerintah, seiring dengan berkembangnya masyarakat di bawah sistem budaya *kapitalis*, keinginan masyarakat, terutama kalangan atas, seringkali menekankan dikotomi. Fenomena di atas hanyalah sebuah dikotomi dalam sistem pendidikan Indonesia. Masih banyak dikotomi (fakta sosial) "kelembagaan" antara masyarakat Indonesia dan pemerintah atau mungkin lebih beragam. Dari segi karakteristik keilmuan, terdapat dikotomi antara Madrasah dan Sekolah.

Masih banyak dikotomi yang hidup dan berkembang pada lembaga mereka menjadi fakta sosial di masyarakat dan pemerintah Indonesia (1) Keilmuan yang dimiliki pesantren, madrasah dan sekolah, serta dikotomi antara perguruan tinggi negeri dibawah

kemendikbud (PTU) dan PTKIS perguruan tinggi di bawah Kemnetrian Agama. (2) Animo pendaftar antara sekolah Unggulan dan tidak dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. (3) sekolah yang terakreditasi dan tidak terakreditasi dari standar nasional pendidikan (SNP), (4) skill sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). (5) Pendanaan dan pengelola baik di sekolah negeri maupun swasta.

Fakta diatas *polimorfisme* yang dialami diakui atau tidak, adalah fakta sosial yang belum terselesaikan dan belum ada jawaban. yang mengakar kuat dalam pandangan sebagian besar masyarakat dan pejabat dari berbagai kementerian baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Dikotomi berkelanjutan adalah dikotomi antara ilmu agama dan umum atau sains yang melahirkan dua sistem pendidikan di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan umum dan agama diantaranya Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengan Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) sedangkan yang agama Raudhatul Athfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Keislaman (PTKIS) baik swasta maupun negeri yang menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan dan segala dampak yang ditimbulkannya. oleh dikotomi baik dari pengelolaan, bantuan atau bahkan program bantuan sarana dan prasarana sampai aplikasi data pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan

Telah mendarah daging dalam sejarah pendidikan di Indonesia sejak nusantara dikuasai penjajahan Belanda dan Jepang, hingga tiga zaman. Kemerdekaan Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi). Sebab saat ini sistem pendidikan yang diusung oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, terlepas diakui atau tidak, masih berkaitan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Belanda.

B. Metode Penelitian

Metode digunakan dalam tulisan ini *Deskriptif Kualitatif* untuk mendeskripsikan Madrasah Sebagai Output Dikotomisasi Pendidikan Islam di Indonesia. Melalui metode membaca, menganalisis mencatat, dan menginterpretasikan data yang ada hubungan dengan penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini studi *literature* atau penelitian dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa *literature* seperti buku, jurnal, Skripsi, undang-undang dan peraturan pemerintah maupun karya Ilmiah yang ada hubungannya Madrasah Sebagai Output Dikotomisasi Pendidikan Islam di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Definisi dikotomi Pendidikan

Pembagian atas dua kelompok yang dikenal dengan dikotomi. (John M. Echols, 1992 :180). Dikotomi merupakan dualisme agama dan budaya. Berdasarkan pengertian dikotomi madrasah dan sekolah dipisahkan oleh kesadaran untuk mengamalkan ilmu agama dan mempelajari pengetahuan. Diskriminasi dan Dikotomi terjadi di tempat yang terbagi maupun terpisah. aturan yang menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan yang mengakibatkan timbulnya konflik dan pembaharuan peradaban yang kabur dan transfaran atau tidak *kaffah* (lengkap).

Secara terminologi dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu (umum) dan agama, yang kemudian menjadi *fenomena* dikotomi lainnya. Dikotomi terdiri dari pembagian *spesies* secara hati-hati dan jelas menjadi dua spesies *independen*. Satu tidak boleh dimasukkan dalam lainnya, dan sebaliknya. (Samsul Nizar, 2008: 230)

2. Sejarah dikotomi pendidikan

Mayoritas masyarakat berpikir bahwa dikotomi pendidikan sudah turun temurun dari zaman kolonial Belanda. Orang Belanda memiliki kepentingan pada pengetahuan umum dan agama yang berhubungan Indonesia, pada sisi lain VOC butuh penduduk pribumi untuk dijadikan pembantu. Lahirnya dikotomi pendidikan dilatar belakangi oleh kepentingan Belanda, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sebagai misionaris dan masyarakat pribumi diberikan pendidikan secukupnya.

Isu dikotomi pendidikan diperparah oleh fakta dan realita pada masyarakat sebagai manifestasi dari dualisme peradaban dan pendidikan, (1) Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan agama (2) Sistem pendidikan umum memandang pendidikan agama adalah kebutuhan individu dalam bernegara dan berkeyakinan

Kebijakan yang kurang berpihak dan merugikan pendidikan agama tetap berlangsung ketika Jepang memegang kendali Negara namun memberi kebebasan dibandingkan dengan kolonial Belanda. Kebijakan mereka berorientasi kepada penguatan kekuasaan di Indonesia, yang mendukung kelangsungan perang Asia Timur Raya secara tidak langsung mendapat dukungan umat muslim dengan membantu madrasah, mengangkat tokoh agama di Kantor Urusan Agama dengan alasan pembinaan kenyataannya hanyalah sebagai pengontrol Islam umat muslim dalam bidang pendidikan.

Kebijakan negara pada bidang pendidikan adalah produk lembaga legislatif dan eksekutif dalam politik yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang memberikan implikasi terhadap sistem, proses dan kurikulum pendidikan.

Dasar pendidikan dan pengajaran yang dicantumkan dalam UU pendidikan nasional tahun 1950 nomor 4 menjelaskan bahwa pendidikan agama baik dimadrasah maupun di pesantren tidak termasuk dalam UU tersebut hanya pengajaran pendidikan agama di sekolah umum. Pendidikan agama sangat dominan dipenuhi oleh ajaran

Agama yang berubah menjadi kementerian agama. Pendidikan agama sangat dominan dipenuhi oleh ajaran dan pemahaman agama belum memiliki kurikulum yang standar dan konsentrasi tentang ilmu agama saja, struktur yang tidak sistematis, manajemen tidak terkontrol oleh pemerintah

Dalam penertiban administrasi, materi, evaluasi dan pengawasan yang diselenggarakan oleh kementerian agama dan pendidikan dan kebudayaan

Sistem pendidikan Islam lebih didominasi oleh muatan agama, belum memiliki dan menggunakan kurikulum yang standar dan lebih memfokuskan kurikulumnya pada *tafaqqahu fiddin*, yang konsentrasi pada bidang keislaman, struktur yang tidak sistematis, dan manajemen tidak terkontrol oleh pemerintah. Kurikulum yang menjadi salah satu pembeda sistem pendidikan yang berlangsung. Dalam rangka penertiban administrasi dan pengawasan pendidikan yang diselenggarakan oleh dua departemen yaitu departemen pendidikan nasional dan departemen agama.

Berdasarkan keputusan presiden tahun 1972 tentang keseragaman penyelenggaraan pendidikan yang diseragamkan antara pendidikan di bawah naungan kementerian agama dan dinas pendidikan dan kebudayaan, Keputusan ini menjadi pro dan kontra dari umat. bahwa melalui penggabungan pendidikan agama dengan sistem pendidikan nasional akan memberikan status atau kesamaan antara madrasah dan sekolah. Tetapi beberapa kongkurensi bahwa madrasah harus departemen agama karena mengabaikan peran dan manfaat madrasah jika dikelola oleh Depdikbud karena departemen ini hanya bertanggung jawab pada penyelenggaraan pendidikan nasional dan bagian dari sekulerisasi yang berlaku pada Orde Baru dengan cerminan sosial politik yang dikambang hitamkan.

Melihat reaksi masyarakat muslim yang sangat keras. Maka pemerintah mengambil kebijakan dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 1975 No. 037/U/1975; dan No. 36 Tahun 1975. Pada tanggal 24 Maret 1975, yang disepakati oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam negeri. isi SKB Tiga Menteri tersebut adalah: (1) Ijazah Madrasah dengan ijazah sekolah umum sama untuk semua jenjang yang sesuai dengan tingkatannya; (2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat sesuai jenjang dan tingkatannya (3) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat, dengan catatan madrasah harus merangkai

kurikulum 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama.

Tindaklanjut SKB, Kementerian Agama mengeluarkan kurikulum madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) perdana pada tahun 1976 yang menjadi pedoman dalam kesamaan dalam pelajaran agama, baik materi maupun waktunya dan diakui kesetaraan sepenuhnya madrasah dan sekolah umum yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional.

Tahun 1984 dikeluarkan SKB dua menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah.

Secara intelektual muncul kurikulum umum dan kurikulum agama yang berdampak pada dikotomisasi kelulusan antara dua lembaga yang menciptakan label Islam dan label umum. Alumni madrasah sering didiskriminasi karena banyak beranggapan bahwa mereka hanya paham agama saja dari alumni madrasah hingga alumni Perguruan Tinggi Keislaman (PTKIS) sebagai produk pendidikan Islam yang dianggap hanya mampu berdo'a dan tidak memiliki dan mampu berkarya. Hal inilah yang seharusnya di jawab bagi pengelola pendidikan agama untuk mengurangi diskriminasi terhadap lulusan pendidikan dibawah naungan kementerian agama.

3. Sistem Pendidikan di Indonesia

a. Pra Merdeka

Perkembangan Islam di Indonesia dilihat dari sejarah dan sosiologis sangat kompleks. Perbedaan pendapat mengenai Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M dan abad ke-7 M akan tetapi mayoritas sejarawan mengungkapkan bahwa Aceh merupakan daerah yang menjadi awal penyebaran islam di Indonesia (Abdullah Taufik, 1983:27)

Awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan para muballigh dalam mensyiarkan ajaran Islam dimana saja dalam setiap kesempatan melalui media dan strategi yang diterima masyarakat. Hampir pada setiap desa yang ditempati kaum muslimin, mereka mendirikan tempat ibadah dan pengajaran huruf hijaiyah, mereka mendirikan Surau, Langgar untuk belajar membaca qur'an atau mengaji dan tempat mengerjakan shalat 5 waktu.

Pendidikan agama Islam di masa prakolonial dalam bentuk pengajian qur'an dan pengajian yang menjadi indikator keilmuan. Pendidikan Islam sangat bertentangan dengan pendidikan umum melalui pemerintah kolonial Belanda pada abad 17. Perubahan pendidikan baik dari sistem kelembagaan, materi pengajaran,

metode juga struktur organisasinya sebagai akibat dari pembaharuan pendidikan yang disebut madrasah.

b. Pasca Merdeka

Lembaga pendidikan Madrasah diakui secara resmi oleh Negara berdasarkan UU No. 4 tahun 1950 pasal 10 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, menyatakan bahwa untuk mendapatkan legalitas dari kementerian Agama, lembaga pendidikan madrasah wajib menyelenggarakan pelajaran utama minimal 6 jam dalam seminggu disamping pelajaran umum.

c. Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama sudah mulai diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pada tanggal 27 Desember 1945, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), pekerjaan ini dimulai dengan pemberian bantuan yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950 bab XII pasal 20 yaitu (a) Pendidikan agama diajarkan di sekolah umum, dan mendapatkan izin dari orang tua (b) pendidikan agama di pendidikan umum diatur Menteri Pendidikan dan Menteri Agama

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama berkaitan dengan peran kementerian agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946.

Pada saat itu, pendidikan Islam dijalankan oleh bagian yang mengkhususkan diri pada pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama didasarkan pada salah satu instruksi pendidikan Islam di Indonesia yang dibuat oleh Seksi Pendidikan Kementerian Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu: (1) Mengajar agama di sekolah umum dan Madrasah (2) memberikan pelajaran umum pada madrasah, (3) Memiliki pelatihan guru agama dan pendidikan hakim Islam secara nasional.

d. Orde Baru

Pemerintah Indonesia terus memperbaiki sistem pendidikan khususnya pendidikan agama. Orientasi kelembagaan resmi pendidikan agama yaitu Kementerian Agama dan pendidikan umum atau sains dikelol Kemendikbud. Kedua kementerian tersebut sama-sama mengeluarkan peraturan pasal yang mengatur tentang pendidikan agama baik di sekolah negeri, swasta dan sekolah umum maupun madrasah.

Kementerian Agama bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan agama di Madrasah dan sekolah umum secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelumnya, pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan karakter yang telah ada sejak zaman Jepang beroperasi secara mandiri di setiap daerah.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara

PKI dan tentara pada masa akhir tahun 1961 kekuasaan Sukarno berakhir, kelompok agama terutama Islam dan Kristen beraliansi bersama tentara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua Menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang Prijono, seseorang tokoh Murba berhubungan dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi adalah Sjarief Tajeb, seseorang tokoh militer. Dengan aliansi agama, dalam akhirnya Sjarief Tajeb mewajibkan pendidikan agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan. adapun kebijakan pendidikan masa orde baru

Rencana pendidikan agama untuk seluruh daerah Indonesia telah disempurnakan melalui pembentukan panitia yang dipimpin Prof. Mahmud Yunus yang mewakili kementerian agama dan Mr. Hadi mewakili kementerian pendidikan dan kebudayaan. Menghasilkan surat keputusan bersama (SKB) pada Januari 1951. Isinya ialah: (1) Pendidikan agama dipelajari dari kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar). (2) wilayah-wilayah yang masyarakatnya taat atau kuat dalam beragama pendidikan agama dimulai dari kelas I. (3) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (madrasah, umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama dua jam perminggu. (4) Pendidikan agama diberikan pada siswa sedikitnya 10 perkelas dan dapat izin dari orang tua. (5) pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Heni Yuningsih, 2015: 178)

Kebijakan pendidikan pada Orde Baru menunjuk adanya penyeragaman dan kesamaan, dari cara berpakaian hingga pemikiran yang mengakibatkan generasi bangsa yang miskin inspirasi dan motivasi karena takut hukuman pemerintah Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap benar. Semua organisasi dalam budaya sejenis bahkan partai politik pun dibatasi hanya 3 partai yang berhak mengikuti Pemilu. Masa orde baru tidak adalagi disparitas pendapat sebagai akibatnya melahirkan disiplin ilmu yang semu dan generasi latah dan penakut, pertumbuhan ekonomi tidak berakar dalam ekonomi masyarakat melainkan bergantung pada hutang utang luar negeri sebagai akibatnya menghasilkan sistem pendidikan tidak peduli terhadap daya saing yang lemah. Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial lantaran warga tidak diikutsertakan ketika merancang sistem pendidikan karena seluruh serba terpusat, dengan demikian, pendidikan mengingkari *pluralisme* warga dan mengakibatkan rendahnya teloransi dan meningkatkan sikap dan sikap egois.

e. Reformasi

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional ketika ini dipandang signifikan dalam pencerdasan anak bangsa. Padahal, hal ini akan membawa kemakmuran meningkatkan martabat bangsa dan rancangan

pendidikan nasional belum berhasil keluar dari kerangka politik etis sebagaimana pendidikan masa lalu yaitu pemerintah kolonial Belanda.

Sistem Pendidikan reformasi tahun 1999 menjadi sejarah awal sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, sebagai sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model "Manajemen Berbasis Sekolah". dalam rangka mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka dibentuk sistem pendidikan yang dikenal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Memasuki tahun 2003 pemerintah mengeluarkan UU No.20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menggantikan UU tahun 1989 Nomor 2 yang menjadi dasar bahwa pendidikan sebagai: "usaha yang dilakukan secara sadar, terstruktur dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif serta menumbuh kembangkan potensi siswa agar mempunyai kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan lapangan pekerjaan atau jenjang pendidikan selanjutnya.

4. Madrasah sebagai solusi dan Output dikotomi

Madrasah merupakan tempat untuk menimba pengetahuan atau tempat belajar yang berasal dari bahasa arab *Darosa* bentuk dari *Zharaf Makan* (keterangan tempat).(Ibrahim Anis,1972:280). Kata madrasah apabila diterjemahkan pada bahasa Indonesia berarti sekolah, mulanya sekolah itu bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan bersumber dari bahasa asing, yaitu school atau scola (A. Malik Fajar,1998: 111).

Madrasah adalah kelanjutan pendidikan masjid forum Khan, yaitu mesjid yang dilengkapi asrama. Penggunaan nama madrasah pada pendidikan Islam pada awal Islam tidak sama dengan pengertian madrasah sekarang. Pengertian madrasah dalam masa klasik Islam dianggap menjadi pendidikan akademi (*college*). Pemberian nama pendidikan Islam buat banyak sekali jenjang menggunakan nama madrasah ini bisa dipahami mengingat nama lebih cenderung dalam fungsi esensialnya untuk berbagi ilmu pengetahuan Islam dan menyebarluaskan paham keagamaan (Ninik Masrorah, 2011: 129)

Sejak Islam masuk ke Indonesia, pendidikan Islam dimulai melalui pengajian di rumah kemudian meningkat menjadi pesantren. Tekanan pemerintah kolonial terhadap umat Islam hanya memungkinkan pendidikan Islam untuk mengajarkan hukum Islam, belajar berdoa, dan membaca qur'an sesuai kebutuhan. Namun, sistem pendidikan pesantren dapat menghasilkan ulama yang dapat menghidupkan kembali agama namun secara administrative belum mempuni, lahirlah madrasah sebagai Sistem klasik yang tertib dikembangkan dalam bentuk lembaga pendidikan formal.

Karel A. *Steenbrik* mengungkapkan bahwa perkembangan madrasah tidak terlepas dari pembaharuan pemikiran umat Islam. Beberapa faktor yang mendorong munculnya konsep pembaharuan madrasah yaitu (1) umat Islam cenderung untuk kembali kepada Qur'an dan Hadits dalam menilai kebudayaan dan kebiasaan pada masyarakat untuk menolak atau menerima melalui dasar dalil yang jelas (2) Sebagai perlawanan nasional melalui akademik terhadap pola pendidikan kolonial Belanda (3) Untuk memperkuat kepentingan di bidang sosial ekonomi (4) Sebagai bentuk protes organisasi Islam terhadap metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama yang bersifat monoton dan dikembangkan metode materi dan tujuan pendidikan. (Karel A. Steenbrik, 1986: 27-28).

Banyak insiden kecemasan dalam memilih pendidikan pada sisi lain ingin anaknya sekolah di sekolah umum, berharap suatu saat bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan namun tidak memiliki ilmu agama karena mata pelajaran agama tidak *balance* hanya pada SD 4 JTM, SMP 3 JTM dan 3 JTM. Di sisi lain, ada juga orang tua yang mendorong anaknya belajar agama di pondok pesantren atau masuk pada Madrasah yang pendidikan agamanya lebih banyak dan dibagi secara *detail* menjadi beberapa aspek diantaranya Fiqih, Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam dan Aqidah Akhlak dengan harapan agar bisa menjadi ulama, dengan risiko tidak memiliki ijazah pendidikan formal untuk persiapan bekerja, namaun madrasah memberi solusi dengan bias bekerja dan mengamalkan ilmu agama.

Lahirnya madrasah sebagai hasil dikotomi pendidikan umum dan agama yang dipengaruhi oleh (a) perkembangan ilmu dan pengetahuan sangat cepat pada sains dan membentuk abang ilmu tersebut namun pada kajian agama mentok pada diskusi dan perdebatan inilah yang menjauhkan keberkahan ilmu pengetahuan (b) sejarah kemunduran perkembangan umat Islam sejak Abad Pertengahan yang sampai saat ini belum berkembang sehingga umat Islam tidak terlalu peduli dengan perkembangan sains dan teknologi. (c) faktor yang melekat pada lembaga pendidikan Islam karena kompleksitas masalah ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya yang dihadapi oleh penduduk mayoritas Muslim ini mereka berusaha untuk melakukan reformasi dan hanya pada ranah rencana, mengamati, dan duplikasi serta modifikasi dan tidak berinovasi hingga saat ini, meskipun madrasah sudah memiliki slogan hebat dan bermartabat.

UU Standar Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 0489/U/1992 dan PP 28 dan 29 Tahun 1990 merupakan sejarah baru bagi madrasah yang berciri khas agama Islam dengan menggabungkan Sistem dan materi pendidikan pesantren dan sekolah umum.

Pada awalnya pendirian sekolah di Indonesia sebagai strategi kolonial dalam memperluas pengaruh agama (Kristen). Dan

dorongan kuat penjajah untuk menguasai ekonomi dan politik yang menjauhkan antara pendidikan dan islam, lahirnya madrasah merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia (Junimar Affan,1987:56-57.)

Muhaimin mengungkapkan bahwa lahirnya madrasah di Indonesia merupakan (1) Sebagai manefestasi dan realisasi pembaharuan system pendidikan Islam. (2) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan di pesantren yang sama menggunakan sekolah formal. Seperti memiliki ijazah dan kesempatan kerja (3) pembiasaan perilaku mental menggunakan system pendidikan umum (4). Sebagai solusi untuk menjembatani sistem pendidikan tradisional di pesantren dan sistem pendidikan modern. (Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 305).

Madrasah adalah solusi bagi umat Islam untuk mengakhiri sejarah dikotomi pendidikan Islam. Dengan sistem yang dimiliki pada semua jenjang pendidikan dibawah naungan Kementerian agama MI, MTs dan MA, madrasah sebagai sarana paling ideal bagi umat islam di Indonesia. Dari aspek kurikulum, madrasah mengajarkan semua ilmu yg diajarkan oleh sekolah umum, sekaligus diperkaya menggunakan 5 cabang ilmu kelslaman. Selain itu madrasah jua mempunyai pengajar, media belajar yang berkualitas. Sehingga optimism dapat disandingkan pada madrasah, menjadi forum pendidikan terbaik bagi Umat Islam sekaligus bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan, Muhaimin *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Trigenda, 1993
- Anis, Ibrahim *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo, Dar al-Ma'arif, 1972
- Fajar, A. Malik, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta: LPNI, 1998
- Hassan Shadily dan, John M. Echols *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta : PT. Gramedia Utama, 1992
- Heni Yuningsih, *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru*, Jurnal Tarbiyah. Vol.1 No.1. 2015.
- Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986
- Nizar, Samsul Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
- Said, H.M., dan Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, Bandung, Jenmars, 1987
- Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975
- Taufik, Abdullah Ed. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983
- Umiarso, dan Ninik Masrorah, *Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011
- Watik Ahmad Pratiknya, "Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia", Muslih Usa (Ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991